



**PENETAPAN**

**Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Jnp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Sri Winanengsi binti Alimuddin**, NIK 7304044101990003, tempat tanggal lahir Bontosunggu, 01 Januari 1999, Agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan Honorer di Rumah Sakit Lanto Dg Pasewang, bertempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Irfianto bin Pattamuda**, NIK 7304111707900001, tempat tanggal lahir, Simpang, 17 Juli 1990, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI, tempat kediaman di Dusun Simpang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tanggal 5 Februari 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, 28 Mei 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0028/014/V/2016, tanggal 27 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah dinas Kab. Pinrang, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selama 2 tahun 7 bulan, namun belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2016, rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran keduanya, terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi penggugat selama hidup bersama, penggugat merasa tidak cukup dengan pemberian nafkah yang diberikan oleh tergugat, serta penggugat merasa tidak dipercaya dalam mengelolah pendapatannya dan lebih memilih menyimpan sendiri;
  - Tergugat sering menceritakan persoalan rumah tangganya kepada orangtuanya, sehingga orangtuanya ikut campur terhadap persoalan keduanya;
  - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat selama tiga bulan lamanya terhitung sejak berpisah, tergugat tidak pernah menemui penggugat untuk kembali memperbaiki rumah tangganya;
  - Tergugat tidak lagi memperdulikan penggugat selama enam bulan lamanya;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2018, penggugat pergi meninggalkan tergugat, dengan sepengetahuan tergugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
6. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat, **Irfianto bin Pattamuda**, terhadap Penggugat, **Sri Winanengsi binti Alimuddin**;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat memberikan keterangan di persidangan, bahwa Tergugat merupakan anggota TNI aktif yang saat ini bertugas di Kodam Makassar, yang hingga saat ini Penggugat maupun Tergugat belum pernah mengurus perceraian di kesatuan sehingga Tergugat belum mempunyai surat izin bercerai dari atasannya langsung;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat untuk berpikir-pikir kembali;

Bahwa, oleh karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum jawaban, maka tidak diperlukan persetujuan Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan upaya penasihatannya ternyata berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai anggota TNI belum mempunyai surat izin perceraian dari antasannya, Penggugat jug belum pernah memproses perceraian dari kesatuan Tergugat, selanjutnya dalam persidangan Penggugat menyatakan permohonan untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan permohonan pencabutan perkaranya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana Pasal 271 dan 272 Rv ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Jnp. selesai dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar R

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

p386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Sulastrisuhani, S.H.I. Musafirah, S.Ag., MHI.  
Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	270.000,00
4.	PNBP Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah		Rp386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Jnp.